

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek pada kajian kali ini memakai sampel dari realisasi beberapa variabel yang dipilih dari sumber pendapatan dan belanja tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut diperoleh dari LKPD tiap Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diambil melalui situs web resmi Pemerintah Daerah melalui web PPID, situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Situs web resmi keputusan gubernur jawa tengah (JDIH).

Data tersebut didapat dari sumber resmi pemerintah daerah yang dengan itu diharapkan akan menghasilkan penelitian yang akurat, jelas, tepat, dan terpercaya dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan dengan peraturan yang relevan. Penelitian mengambil periode selama 5 tahun, yaitu tahun 2019 - 2023. Periode tersebut dipilih agar hasil penelitian semakin akurat dan lebih aktual saat dilakukan penelitian.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Penelitian**

Dalam penelitian, objek yang dianalisis yaitu laporan realisasi APBD tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023. Pada proses pelaksanaannya membutuhkan kriteria sampel yang tepat agar pengelolaan data lebih akurat dan tepat. Penelitian tersebut mengambil penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal selama

lima (5) periode. Maka, perhitungan banyaknya sampel yaitu 35 kabupaten/kota x 5 tahun (2019-2023) jadi total sampel sebanyak 175 observasi.

Peneliti mengolah data berdasarkan rumus yang telah diuji pada peneliti-peneliti sebelumnya dan data tabulasi tersebut diolah yang kemudian akan diuji melalui perangkat lunak *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 26. Setelah tahap seleksi atas dasar kebutuhan penelitian, akan diperoleh hasil sampel sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Pengambilan Sampel**

| No | Kriteria Sampel                                                                                                                       | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Kabupaten/kota berada di wilayah Provindi Jawa Tengah                                                                                 | 35     |
| 2  | Memiliki data realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan Belanja Modal pada kabupaten/kota secara lengkap tahun 2019-2023 | (2)    |
|    | Sampel sesuai dengan kriteria                                                                                                         | 33     |
|    | Tahun Amatan                                                                                                                          | 5      |
|    | Jumlah Observasi                                                                                                                      | 165    |

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Pada uji tersebut menjadi acuan untuk menggambarkan secara numerik maupun grafis. Uji penelitian ini penting saat eksplorasi data sebelum menganalisis statistik lanjutan. Dengan metode tersebut akan mudah dipahami dalam menganalisis pola-pola dasar data, mengidentifikasi outlier, dan memutuskan strategi dengan akurasi untuk analisis lanjutan.

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics |     |                 |                   |                    |                     |
|------------------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                        | N   | Minimum         | Maximum           | Mean               | Std. Deviation      |
| Pajak Daerah           | 165 | 32.500.000.000  | 2.132.818.531.293 | 179.814.473.509,07 | 285.690.538.268,253 |
| Retribusi Daerah       | 165 | 5.001.088.000   | 128.798.007.029   | 23.091.667.648,12  | 18.120.824.461,196  |
| DAU                    | 165 | 407.860.999.000 | 1.437.036.239.000 | 938.713.491.766,09 | 247.443.249.124,718 |
| DAK                    | 165 | 43.668.645.189  | 667.271.067.417   | 338.398.768.791,97 | 122.392.251.218,831 |
| Belanja Modal          | 165 | 75.192.210.131  | 1.089.358.396.203 | 317.776.436.884,53 | 162.134.543.931,143 |
| Valid N (listwise)     | 165 |                 |                   |                    |                     |

Sumber: Data diolah, 2024 (*Output SPSS 26*)

1) Pajak Daerah sebagai variabel independen pertama (X1) dari 165 sampel diketahui nilai terendah 32.500.000.000 dan nilai tertinggi sebesar 2.132.818.531.293. Nilai rata-rata memperoleh sebesar 179.814.473.509,07 dengan nilai standar deviasi sebesar 285.690.538.268,253.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai variabel independen kedua (X2) dari 165 sampel diketahui nilai terendah 5.001.088.000 dan nilai tertinggi sebesar 128.798.007.029. Nilai rata-rata memperoleh sebesar 23.091.667.648,12 dengan nilai standar deviasi sebesar 18.120.824.461,196 .

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen ketiga (X3) dari 165 sampel diketahui nilai terendah 407.860.999.000 dan nilai tertinggi sebesar 1.437.036.239.000. Nilai rata-rata memperoleh sebesar 938.713.491.766,09 dengan nilai standar deviasi sebesar 247.443.249.124,718.

#### 4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen keempat (X4) dari 165 sampel diketahui nilai terendah 43.668.645.189 dan nilai tertinggi sebesar 667.271.067.417. Nilai rata-rata memperoleh sebesar 338.398.768.791,97 dengan nilai standar deviasi sebesar 247.443.249.124,718.

#### 5) Belanja Modal

Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 dari 165 sampel diketahui nilai terendah sebesar 75.192.210.131 dan nilai tertinggi sebesar 1.089.358.396.203. Nilai rata-rata Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 sebagai variabel dependen (X1) sebesar 317.776.436.884,53 dan nilai standar deviasi sebesar 162.134.543.931,143.

### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pada uji dalam penelitian tidak akan selalu lengkap hasilnya. Namun, berfungsi penting memberikan gambaran kerja untuk analisis hasil regresi dan sebagai keterangan jika model regresi cukup lolos dari asumsi-asumsi klasik.

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu prosedur statistik yang memastikan apakah benar data dari populasi dengan pendistribusian yang normal. Walaupun distribusi normal akan selalu menjadi distribusi data yang berimbangan dengan nilai rata-rata dengan istilah lain hampir seluruh data berpusat pada kisaran nilai rata-rata. Distribusi normal ditandai dengan bentuk kurva lonceng (bell-shaped curve) yang simetris, di mana sebagian besar nilai observasi berkumpul di sekitar nilai tengah (mean), dan

sisanya tersebar secara merata ke kedua sisi. Pola distribusi ini penting karena menjadi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi dan uji statistik parametrik lainnya.

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

| <b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>          |                |                         |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                                  |                | 165                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>                   | Mean           | ,0000000                |
|                                                    | Std. Deviation | ,32755385               |
| Most Extreme Differences                           | Absolute       | ,047                    |
|                                                    | Positive       | ,047                    |
|                                                    | Negative       | -,046                   |
| Test Statistic                                     |                | ,047                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                             |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |
| a. Test distribution is Normal.                    |                |                         |
| b. Calculated from data.                           |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction.             |                |                         |
| d. This is a lower bound of the true significance. |                |                         |

Sumber: Data diolah, 2024 (*Output SPSS 26*)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Diperlihatkan bahwa nilai residual dari uji normalitas untuk setiap variabel pada total data 165 unit analisis adalah sebesar 0,200, perihal ini menunjukkan bahwa  $0,200 > 0,05$ . Dapat diinformasikan data uji normalitas tersebut normal terdistribusi dan dapat lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu pengujian guna memastikan terdapat interkorelasi atau kolinearitas terhadap model regresi antar variabel dependen. Interkorelasi tersebut ditemui dari nilai koefisien korelasi antara variabel bebas pada nilai *Variance Inflation Factor* VIF dan *tolerance*.

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup>  |            |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                      |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                            |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                          | (Constant) | ,518                        | 2,492      |                           | ,208  | ,836 |                         |       |
|                            | LNx1       | ,213                        | ,058       | ,331                      | 3,638 | ,000 | ,387                    | 2,586 |
|                            | LNx2       | -,029                       | ,076       | -,035                     | -,385 | ,701 | ,391                    | 2,556 |
|                            | LNx3       | ,756                        | ,157       | ,511                      | 4,813 | ,000 | ,285                    | 3,515 |
|                            | LNx4       | ,012                        | ,097       | ,013                      | ,127  | ,899 | ,306                    | 3,264 |
| a. Dependent Variable: LNY |            |                             |            |                           |       |      |                         |       |

Sumber : Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Berdasarkan tabel 4.8 diperlihatkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Maka, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel–variabel selanjutnya model regresi dapat menjadi syarat uji selanjutnya, yaitu uji heterokedastisitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Pada Uji Heteroskedastisitas tersebut memiliki fungsi dalam model regresi untuk mrnguji jika terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu dengan yang lain sama. Model regresi memilki hasil yang baik jika tidak terjadi Heteroskedastisitas atau debut Homoskedastisitas, karena data tersebut kumpulan data yang mewakili berbagai ukuran dan nilai.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup>     |            |                             |            |                           |       |      |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                         |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                               |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                             | (Constant) | -,027                       | 1,538      |                           | -,018 | ,986 |
|                               | LNx1       | ,024                        | ,036       | ,083                      | ,658  | ,512 |
|                               | LNx2       | -,031                       | ,047       | -,083                     | -,656 | ,513 |
|                               | LNx3       | ,030                        | ,097       | ,046                      | ,312  | ,755 |
|                               | LNx4       | -,016                       | ,060       | -,039                     | -,271 | ,787 |
| a. Dependent Variable: ABSRES |            |                             |            |                           |       |      |

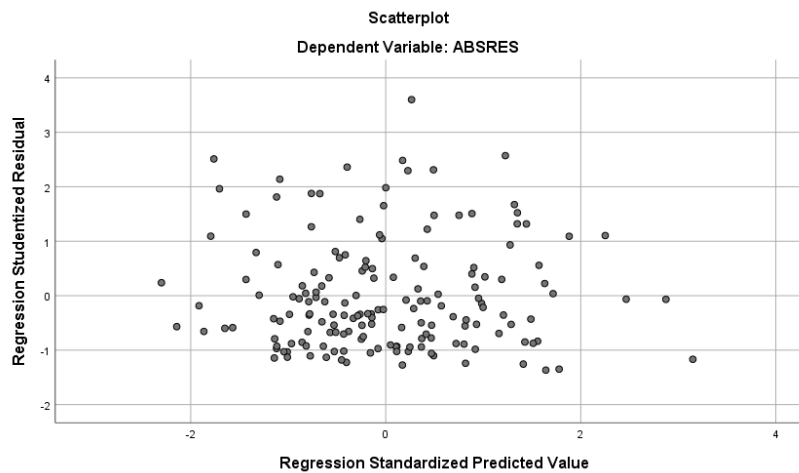
Sumber: Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Berdasarkan tabel 4.9 dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat bahwa nilai  $> 0,05$ , masing – masing dari variabel tersebut menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05. Hasil uji glejser pada variabel independen didapatkan nilai Sig yaitu untuk Pajak daerah (LNx1) sebesar 0,512, Retribusi Daerah (LNx2) sebesar 0,513, Dana Alokasi Umum (LNx3) sebesar 0,755, dan Dana Alokasi Khusus sebesar (LNx4) sebesar 0,787. Maka dapat disimpulkan semua nilai menunjukkan signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi digunakan. Penyebaran titik yang

merata tanpa pola tertentu mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

**Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Berdasarkan pada gambar 4.1 hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa dalam grafik *scatterplot* dapat dilihat titik – titik tidak ditemukan pola yang kelas dan titik-titik residual menyebar diatas dan dibawah angka nol. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dan model dapat menjadi syarat uji selanjutnya, yaitu uji autokorelasi.

#### **4) Uji Autokorelasi**

Pada uji auto korelasi tersebut berfungsi untuk mengevaluasi jika terdapat korelasi nilai antar variabel dalam periode yang berurutan. Biasanya uji autokorelasi ditemukan dalam periode yang berurutan dimana nilai periode ini berkaitan dengan nilai periode sebelumnya atau bahkan periode setelahnya dalam waktu yang sama. Uji tersebut menjadi salah satu uji paling penting karena autokorelasi menjadi penyebab alasan konsisten atau tidak dan efisien atau tidak



dari sebuah model statistik, terutama saat analisis periode yang berurutan atau regresi.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b>                                  |                   |          |                   |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                                                             | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                                                                 | ,629 <sup>a</sup> | ,396     | ,381              | ,30702                     | 2,055         |
| a. Predictors: (Constant), LAG_LNX4, LAG_LNX2, LAG_LNX1, LAG_LNX3 |                   |          |                   |                            |               |
| b. Dependent Variable: LAG_LNY                                    |                   |          |                   |                            |               |

Sumber: Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Berdasarkan tabel 4.10 memperlihatkan jika hasil uji autokorelasi menggunakan *Cochrane-Orcutt* dengan melihat *Durbin-Watson* sebesar 2,055. Nilai *Durbin-Watson* dalam penelitian tersebut dibandingkan dengan menggunakan signifikansi level sebesar 5% dengan jumlah data sebanyak ( $N = 165$ ) sampel dan jumlah independen sebanyak ( $K = 4$ ) variabel. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan model dapat menjadi syarat uji selanjutnya, yaitu uji analisis regresi linear berganda.

$$DU (1,7953) < DW (2,055) < 4-DU (2,2047)$$

#### 4.2.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda yaitu metode statistik yang berfungsi untuk memahami korelasi antara variabel dependen dengan variabel independennya. Uji analisis tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dan hasil data tersebut dapat digunakan dalam membuat keputusan. Berikut disajikan tabel regresi linear berganda:

**Tabel 4. 7 Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup>      |            |                             |            |                           |        |      |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                          |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                                |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                              | (Constant) | -2,111                      | 1,992      |                           | -1,060 | ,291 |
|                                | LAG_LNX1   | ,149                        | ,066       | ,206                      | 2,255  | ,025 |
|                                | LAG_LNX2   | ,051                        | ,086       | ,054                      | ,588   | ,558 |
|                                | LAG_LNX3   | ,954                        | ,165       | ,531                      | 5,788  | ,000 |
|                                | LAG_LNX4   | -,059                       | ,091       | -,057                     | -,643  | ,521 |
| a. Dependent Variable: LAG_LNY |            |                             |            |                           |        |      |

Sumber: IData diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Persamaan regresi linear berganda berikut dapat dibuat dengan memperhatikan angka pada *Unstandarized Coefficients Beta*:

$$Y = -2,111 + 0,149 X_1 + 0,051 X_2 + 0,954 X_3 + 0,059 X_4 + e$$

Berikut adalah arti dari persamaan tersebut:

- Dengan asumsi jika variabel independen bernilai 0, maka belanja modal diperkirakan akan bernilai -2,111. Namun demikian, secara praktis tidak mungkin terjadi tapi tetap diperlukan dalam model sebagai dasar perhitungan matematis.
- Koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0,149 menunjukkan bahwa jika setiap variabel pajak daerah meningkat maka belanja modal di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,149.
- Koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 0,051 menunjukan bahwa jika setiap variabel retribusi daerah meningkat maka belanja modal

di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,051

- d. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar 0,954 menunjukkan bahwa jika setiap variabel dana alokasi umum meningkat maka belanja modal di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,954
- e. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus sebesar -0,059 menunjukkan bahwa jika setiap variabel retribusi daerah meningkat maka belanja modal di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar -0,059

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis berfungsi untuk meyakinkan jika kesimpulan dari data statistik berdasarkan pada analisis yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan istilah lain, uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu pernyataan tentang populasi berdasarkan data sampel.

##### 1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu pengukuran yang berfungsi untuk evaluasi seberapa akurat dan cocok model regresi terhadap hasil. Dengan istilah lain uji tersebut sebagai ukuran sejauh mana variasi dari variabel dependen dapat menjelaskan variabel independennya pada model regresi. Jika semakin tinggi nilai  $R^2$ , maka semakin besar variabel independen rata terhadap variabel dependennya dan semakin bagus kemampuan model dalam menjelaskan data empiris. Namun,  $R^2$  tidak bisa memberikan gambaran

apakah variabel independen tersebut memiliki sifat kausal terhadap variabel dependen, dan  $R^2$  dengan nilai tinggi tidak selalu menjamin kebaikan model secara keseluruhan.

**Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b>                                  |                   |          |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                                                             | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                                                 | ,629 <sup>a</sup> | ,396     | ,381              | ,30702                     |
| a. Predictors: (Constant), LAG_LNX4, LAG_LNX2, LAG_LNX1, LAG_LNX3 |                   |          |                   |                            |
| b. Dependent Variable: LAG_LNY                                    |                   |          |                   |                            |

Sumber : Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,629 atau 62,9%. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pajak daerah, retribusi daerah, dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dapat mempengaruhi variabel belanja modal, dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,381 atau 38,1%. Variabel lain dapat mempengaruhi bagian yang tersisa sebesar 0,619 atau 61,9%.

## 2) Uji Simulatan (Uji F)

Uji F pada uji hipotesis yang menggunakan distribusi F berfungsi untuk menguji antara varians dari dua atau lebih kelompok terdapat perbedaan yang signifikan. Penggunaan Uji tersebut dalam analisis ragam (ANOVA) sering digunakan agar dapat mengetahui perbandingan rata-rata lebih dari dua kelompok data.

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan**

| ANOVA <sup>a</sup>                                                |            |                |     |             |        |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model                                                             |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                                                                 | Regression | 9,822          | 4   | 2,455       | 26,049 | ,000 <sup>b</sup> |
|                                                                   | Residual   | 14,987         | 159 | ,094        |        |                   |
|                                                                   | Total      | 24,809         | 163 |             |        |                   |
| a. Dependent Variable: LAG_LNY                                    |            |                |     |             |        |                   |
| b. Predictors: (Constant), LAG_LNX4, LAG_LNX2, LAG_LNX1, LAG_LNX3 |            |                |     |             |        |                   |

Sumber: Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Menurut tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 26,049 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan variasi Belanja Modal pada pemerintah daerah.

### 3) Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau (Uji T) dalam penelitiannya menjadi yang paling umum digunakan dalam hal memvalidasi adanya perbedaan antara dua atau lebih kelompok, dengan asumsi- asumsi perlu diperhatikan seperti distribusi normalitas data. Penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), kriteria yang menentukan hipotesis diterima atau ditolak:

- a. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi kurang dari 0,05
- b. Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai dari 0,05

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (T)**

| Coefficients <sup>a</sup>      |            |                             |            |                           |        |      |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                          |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                                |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                              | (Constant) | -2,111                      | 1,992      |                           | -1,060 | ,291 |
|                                | LAG_LNX1   | ,149                        | ,066       | ,206                      | 2,255  | ,025 |
|                                | LAG_LNX2   | ,051                        | ,086       | ,054                      | ,588   | ,558 |
|                                | LAG_LNX3   | ,954                        | ,165       | ,531                      | 5,788  | ,000 |
|                                | LAG_LNX4   | -,059                       | ,091       | -,057                     | -,643  | ,521 |
| a. Dependent Variable: LAG_LNY |            |                             |            |                           |        |      |

Sumber: Data diolah, 2024(*Output SPSS 26*)

Hasil pengujian hipotesis, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah (LAG\_LNX1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 menurut hasil uji statistik t nilai ini kurang dari 0,05 menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal
- b. Retribusi daerah (LAG\_LNX2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,558 menurut hasil uji statistik t nilai ini lebih dari 0,05 menemukan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal
- c. Dana alokasi umum (LAG\_LNX3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 menurut hasil uji statistik t nilai ini kurang dari 0,05 menemukan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

- d. Dana alokasi khusus (LAG\_LNX4) umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,521 menurut hasil uji statistik t nilai ini lebih dari 0,05 menunjukkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal

### **4.3 Interpretasi Hasil**

Pada sub bab sebelumnya telah dilakukan uji – uji data sesuai dengan model analisis yang telah ditentukan. Hasilnya yaitu tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Data penelitian tersebut telah didapatkan dalam judul ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023’. Dari hasil uji tersebut dapat diinterpretasikan dengan jelas di atasnya, sebagai berikut :

#### **4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 -2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian. Hasil ini mendukung hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula alokasi belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kenaikan penerimaan pajak daerah memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi

pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal, khususnya pada sektor infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Data empiris menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu daerah dengan kontribusi pajak daerah tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya, pada tahun 2023, realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Semarang mencapai Rp696.290.978.052,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp702.223.912.075,00. Tingginya penerimaan pajak tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai lebih banyak proyek belanja modal seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin optimal pula realisasi belanja modal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Trisnani & Isthika (2022), Sudika & Budiarta (2017), dan Umri et al. (2024) yang sama-sama menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Konsistensi temuan ini memperkuat argumen bahwa pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembangunan yang bersifat produktif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak daerah dapat menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan belanja modal dan mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.



#### **4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,058 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mampu mendukung hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara empiris, peningkatan atau penurunan penerimaan retribusi daerah tidak secara langsung memengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, sehingga tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat untuk mendorong peningkatan belanja modal.

Salah satu penyebab rendahnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal adalah karena karakteristik retribusi itu sendiri. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada subjek pajak atau masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti penggunaan fasilitas pasar, pelayanan parkir, izin usaha tertentu, atau jasa kebersihan. Dengan objek dan subjek retribusi yang terbatas, potensi penerimaan dari retribusi daerah menjadi tidak sebesar pajak daerah. Tidak semua masyarakat

atau pelaku usaha menjadi wajib retribusi, dan jumlah pungutannya juga relatif kecil dibandingkan dengan pajak daerah yang sifatnya lebih luas dan mencakup berbagai sektor perekonomian. Akibatnya, meskipun terjadi kenaikan atau penurunan retribusi, perubahan tersebut tidak cukup signifikan untuk memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan retribusi daerah di berbagai kabupaten dan kota. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya mekanisme pemungutan, kepatuhan wajib retribusi yang rendah, hingga keterbatasan fasilitas dan kualitas layanan yang dikenakan retribusi. Dalam banyak kasus, retribusi daerah bukan merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya terhadap total penerimaan daerah relatif kecil. Belanja modal lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain, seperti pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang memiliki kontribusi fiskal jauh lebih besar dalam mendukung pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Umri et al. (2024), Sudika & Budiarta (2017), serta Trisnani & Isthika (2022) yang juga menyimpulkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Konsistensi hasil ini menegaskan bahwa retribusi daerah, meskipun berfungsi sebagai salah satu instrumen PAD, belum mampu memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan belanja modal. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pemungutan retribusi,

memperluas basis objek retribusi, serta meningkatkan kualitas layanan publik agar penerimaan dari retribusi dapat meningkat dan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan belanja modal di masa mendatang.

#### **4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian. Temuan ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka semakin besar pula alokasi anggaran untuk belanja modal yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal di mana transfer dana dari pemerintah pusat, melalui mekanisme DAU, berperan sebagai sumber daya utama dalam mendukung kebutuhan pendanaan daerah, terutama pada daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen utama transfer pemerintah pusat yang bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan yang ada. Namun demikian, meskipun penggunaannya bersifat fleksibel, dalam praktiknya sebagian besar DAU digunakan untuk mendukung pengeluaran rutin dan belanja modal, khususnya yang terkait dengan

pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta layanan publik yang bersifat jangka panjang. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan belanja modal, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Penyesuaian jumlah DAU yang diberikan kepada masing-masing daerah telah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kapasitas fiskal daerah. Daerah dengan keterbatasan PAD, seperti kabupaten dengan basis ekonomi kecil, sangat bergantung pada transfer DAU sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Ketergantungan ini menjadikan DAU sebagai salah satu variabel penting yang secara langsung mempengaruhi besarnya belanja modal yang dapat dilakukan. Peningkatan alokasi DAU dari pemerintah pusat akan memberikan dampak positif pada kapasitas belanja modal daerah, karena semakin besar dana yang diterima, semakin luas pula ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia & Azizah (2023), Yusuf & Galuh (2023), dan A. A. Devi & Tjahjono (2023) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Keselarasan temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa DAU menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Melalui DAU, pemerintah pusat berupaya mengurangi

ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dengan memberikan tambahan dana kepada daerah yang memiliki keterbatasan dalam menghimpun PAD, sehingga daerah tersebut tetap dapat melakukan investasi melalui belanja modal.

Namun demikian, meskipun DAU terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal, beberapa penelitian juga menyoroti bahwa efektivitas penggunaan DAU sering kali dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan perencanaan anggaran daerah. Pada beberapa kasus, alokasi DAU belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang produktif dan bernilai tambah tinggi, karena sebagian besar masih terserap pada pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengaruh positif DAU terhadap belanja modal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas perencanaan anggaran, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana transfer, serta memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar dialokasikan untuk proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah DAU yang disalurkan pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap kapasitas pembangunan daerah, yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan DAU menjadi faktor yang sangat menentukan

keberhasilan pembangunan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

#### **4.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0521 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian. Bahkan arah hubungan yang ditemukan menunjukkan korelasi negatif, di mana peningkatan jumlah DAK tidak selalu diikuti oleh kenaikan belanja modal, atau bahkan berpotensi berbanding terbalik dengan realisasi belanja modal. Temuan ini tidak mendukung hipotesis keempat (H4) yang mengasumsikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara DAK dan belanja modal tidak cukup kuat untuk dapat dianggap signifikan dalam model regresi yang digunakan, sehingga variabel ini tidak menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan pengeluaran belanja modal daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh (Amelia & Azizah, 2023) dikarenakan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendanai kegiatan atau proyek-proyek tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan prioritas nasional, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tertentu. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant dan dapat digunakan

secara fleksibel, DAK bersifat *earmarked grant*, artinya penggunaannya sudah diarahkan dan diatur sesuai dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, meskipun jumlah DAK yang diterima suatu daerah meningkat, hal tersebut tidak selalu berdampak pada peningkatan total belanja modal secara keseluruhan, karena penggunaannya terbatas pada proyek-proyek tertentu dan tidak dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya yang mungkin lebih mendesak di daerah tersebut.

Selain sifatnya yang terikat pada program tertentu, efektivitas DAK juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Pertama, nilai alokasi DAK relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah atau dengan sumber pembiayaan lain seperti DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, kontribusi DAK terhadap total belanja modal menjadi terbatas. Kedua, terdapat permasalahan teknis dan administratif dalam pengelolaan DAK, misalnya keterlambatan transfer dana, mekanisme pencairan yang kompleks, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program yang dibiayai oleh DAK. Hal ini menyebabkan tidak semua dana yang dialokasikan dapat terealisasi sepenuhnya, sehingga dampak DAK terhadap belanja modal menjadi tidak optimal.

Faktor lainnya adalah ketidaksesuaian antara program DAK yang bersifat *top-down* dengan kebutuhan riil daerah. Dalam beberapa kasus, proyek yang dibiayai melalui DAK tidak menjadi prioritas utama daerah, sehingga meskipun dana tersedia, pengaruhnya terhadap peningkatan belanja modal tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat menimbulkan kondisi di mana peningkatan DAK tidak secara langsung mendorong peningkatan belanja modal atau bahkan mengurangi

ruang fiskal daerah untuk proyek lain karena harus menyesuaikan dengan aturan penggunaan DAK